



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2 Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

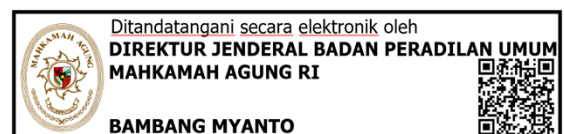
Nomor : 87/DJU/HM1.1/I/2025 Jakarta, 20 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Usulan Target Layanan Hukum

Yth : Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan disusunnya rencana kebutuhan layanan hukum untuk tahun anggaran 2026, 2027, dan 2028, dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengisi daftar usulan kebutuhan layanan hukum tersebut melalui link <https://bit.ly/UsulanLayananHukum2026-2028> selambat-lambatnya **tanggal 24 Januari 2025** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengusulan kebutuhan layanan hukum benar-benar memperhitungkan kebutuhan yang ada di pengadilan masing-masing;
2. Pengadilan agar memperhitungkan realisasi 2 (dua) tahun kebelakang sebagai acuan dalam mengisi daftar usulan;
3. Pengadilan menyertakan surat pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan anggaran layanan hukum sebagaimana terlampir;
4. Penyusunan usulan target dan anggaran **wajib** melibatkan Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan.



Tembusan:
Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi.



FORMAT SURAT

[KOP PENGADILAN]

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN JAMINAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Pengadilan

Dengan ini kami menyatakan bahwa usulan anggaran untuk Layanan Hukum yang kami ajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di Pengadilan Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Hukum	Target Usulan Tahun (Target Output/Usulan Anggaran)		
		2026	2027	2028
1	Posbakum	*) 100 orang/ Rp 36.000.000,00		
2	Prodeo	*) 2 perkara / Rp 720.000,00		
3	Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	*) 5 perkara / Rp 15.000.000,00		

***) CONTOH PENGISIAN PADA TABEL**

Apabila di kemudian hari sebagai pimpinan Pengadilan Negeri tidak dapat merealisasikan usulan anggaran tersebut, maka kami siap menerima sanksi/teguran.

....., tgl/bln/thn
Yang membuat pernyataan
Ketua Pengadilan Negeri

(Nama Jelas)
NIP

Panitera Pengadilan Negeri,

Sekretaris Pengadilan Negeri.....,

(Nama Jelas)
NIP

(Nama Jelas)
NIP

